

## **BAB IV**

### **PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN KOTA PADANG MELAKUKAN KERJA SAMA *SISTER CITY* DENGAN KOTA VUNG TAU**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang tahapan proses pembuatan kebijakan Kota Padang melakukan kerja sama *Sister City* dengan Kota Vung Tau. Bab ini berisi tentang penjelasan tentang Mekanisme kerjasama *Sister city* kota Padang dengan Kota Vung Tau dari tahap perencanaan, tahap penandatanganan LoI, tahap penandatanganan MoU serta keefektifan kerjasama *Sister City* kota Padang dengan kota Vung Tau.

#### **A. Tahapan pembuatan kebijakan kota Padang melakukan kerjasama *Sister City* dengan kota Vung Tau**

Data Matriks kronologi peninjauan kerjasama *Sister city* kota Padang dengan Kota Vung Tau dari tahap perencanaan, tahap penandatanganan LoI dan tahap penandatanganan MoU sebagai berikut :<sup>1</sup>

##### **1. Tahap perencanaan**

Perencanaan Kerjasama *Sister City* diawali pada tanggal 22-27 Agustus 2012 Walikota padang melakukan kunjungan ke Hanoi, Vietnam untuk berjumpa dengan Kedutaan Besar RI Vietnam untuk menyarankan Kota Padang melakukan kerjasama *Sister City* dengan Vietnam dengan pertimbangan pesatnya Ekonomi Vietnam saat itu. Saat itu Kedutaan Besar menyarankan kota Da Nang Vietnam. Kemudian pada tanggal 14 September 2012 Walikota Padang menyurati Kementrian Luar Negeri cq. Direktur Asia Timur Pasifik untuk memfasilitasi kerjasama *Sister City* Tersebut. Tembusan Ke Direktorat Jenderal Asia Pasifik Afrika Kementrian Luar Negeri, Gubernur Sumatera Barat dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang. Kemudian pada tanggal 25 September 2012 Direktorat Jenderal Asia Pasifik Afrika Kementrian Luar Negeri menanggapi surat dari Walikota Padang dan menyatakan dukungan terhadap rencana kerjasama *Sister City* dengan Kota Da Nang dan telah mengintruksikan Duta Besar RI untuk Vietnam di Hanoi untuk memulai peninjauan dengan Kota Da Nang.<sup>2</sup>

Pada tanggal 2 Oktober 2012 Duta Besar RI di Hanoi menyurati Direktorat Jenderal Asia Pasifik Afrika Kementrian Luar Negeri dan Walikota Padang (Tembusan

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Joserizal, SSTP,M.SI, tanggal 6 Februari 2017 pukul 09.40 WIB di Balai Kota Padang.

<sup>2</sup> *Ibid*

ke Gubernur Sumatera Barat) memberitahukan bahwa Kota Da Nang ternyata sudah dalam tahap peninjauan *Sister City* dengan Kota Semarang. Oleh karena itu Duta Besar RI mengusulkan kerjasama dengan Kota Vung Tau dengan pertimbangan karakteristik daerah dan jumlah penduduk yang sama. Pada tanggal 12 Oktober Walikota Padang merespon surat Duta Besar RI untuk Vietnam dengan menulis surat ke Dirjen Asia Pasifik (tembusan ke Duta Besar RI Hanoi) bahwa Pemerintah Kota Padang menerima usulan Duta besar RI untuk menjalin kerjasama dengan Kota Vung Tau.<sup>3</sup>

Pada tanggal 29 Oktober Direktorat Jenderal Asia Pasifik Afrika mengirim surat kepada Walikota Padang bahwa Kementerian Luar Negeri menyetujui dan menyatakan dukungan rencana kerjasama *Sister City* antara Kota Padang dengan Kota Vung Tau. Pada tanggal 5 November 2012 Wali Kota Padang mengirim surat kepada Duta Besar RI di Vietnam dengan tembusan ke Gubernur Sumatra Barat, Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri, Konsula Jenderal RI di Ho Chi Minh City dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, menyampaikan rencana kunjungan ke Kota Vung Tau untuk peninjauan kerjasama *Sister City* yang di maksud.<sup>4</sup>

Pada tanggal 28 November 2012 Walikota Padang didampingi unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Komandan Distrik Militer, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) berkunjung ke Kota Vung Tau dengan didampingi oleh Konsul Jenderal RI untuk Ho Chi Minh City. Kunjungan ini mendapat respon yang amat baik dimana Kota Vung Tau berkeinginan untuk menindaklanjutinya. Pada tanggal 7 Desember 2012 Wali Kota Padang mengirim surat kepada Konsul Jenderal RI di Ho Chi Minh City dengan tembusan kepada Duta Besar RI Vietnam, Direktorat Jenderal Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri, Gubernur Sumatera Barat dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Padang menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus menyampaikan bahwa sehubungan dengan respon yang amat baik dari pihak Vung Tau maka Pemerintah Kota Padang akan memulai tahapan proses Kerjasama *Sister City* berkoordinasi dengan Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri Cq. Dit Asia Timur Pasifik.<sup>5</sup>

Pada tanggal 12 Desember 2012 Surat dari Kementerian Dalam Negeri cq. Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri (AKLN) kepada Gubernur Sumbar

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

dengan tembusan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sekertaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktur Perjanjian Ekonomi Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri, Direktur Asia Timur Pasifik Kementerian Luar Negeri dan Walikota Padang yang menyampaikan persetujuan dan dukungan kepada rencana kerjasama Padang dengan Vung Tau.<sup>6</sup>

## 2. Tahap penandatanganan Loi

Pada tanggal 26 Desember 2012 Sekda Kota Padang mengirim draft Letter of Intent (LOI) Kerjasama Kota Padang dengan Kota Vung Tau kepada Direktur Perjanjian Internasional Ekonomi Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri untuk di koreksi, dengan tembusan ke Gubernur Sumatra Barat, Direktorat Jenderal Asia Pasifik Afrika, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Padang Direktur Asia Timur Pasifik Kementerian Luar Negeri dan Kepala Pusat AKLN Kementerian dalam Negeri. Pada tanggal 10 April 2013 Walikota Padang menyurati Sekjen Kemdagri Cq. Kapus AKLN untuk memohon Pusat AKLN agar dapat memfasilitasi pembahasan draft LOI Kerjasama Padang - Vung Tau, dengan tembusan ke Gubernur Sumbar, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional! Kemenlu, Dirjen Aspasaf Kemenlu dan Ketua DPRD Padang.<sup>7</sup>



Pada tanggal 11 Oktober 2013 Gubernur Provinsi Ba Ria Vung Tau yang membawahi Kota Vung Tau mengirim surat menyatakan akan datang ke Kota Padang untuk menandatangani LOI Kerjasama *Sister City* Kota Padang dengan Kota Vung Tau. Pada tanggal 14 Oktober 2013 Walikota Padang membalas surat Gubernur Provinsi Ba

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

Ria Vung Tau menyatakan siap menerima kunjungan Gubernur Ba Ria Vung Tau dan mempersiapkan penandatanganan LOI Kerjasama *Sister City*.<sup>8</sup>

Pada tanggal 25 Oktober 2013 Penandatanganan LOI *Sister City* Kota Padang dengan Kota Vung Tau oleh WaliKota Padang dan Gubernur Ba Ria Vung Tau yang disaksikan oleh Konsul Jenderal RI untuk HCMC. Delegasi dari VungTau datang berkunjung ke Kota Padang selama 3 hari. Pada tanggal 25 November 2013 Walikota Padang menulis surat kepada Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian, Dirjen Aspasaf Kemenlu, Kapus AKLN Kemdagri dan Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kemsekneg, untuk melaporkan bahwa LOI telah ditandatangani.<sup>9</sup>

### **3. Tahap penadatangan MoU**

Kelanjutan tahapan dari LoI untuk MoU yaitu pada tanggal 28 November 2013 Pemerintah Ba Ria Vung Tau melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Ho Chi Minh City mengundang Pemerintah Kota Padang untuk datang ke Vung Tau guna membahas draft Materi MoU kerjasama *Sister City* Kota Padang dengan Kota Vung Tau. Pada tanggal 12 Desember 2013 Menyikapi Undangan Pemerintah Ba Ria Vung Tau tersebut, Walikota Padang menyurati Dirjen Aspasaf Kemenlu dengan tembusan ke Konsul Jendral Republik Indonesia untuk Ho Chi Minh City, untuk meminta dukungan dan persetujuan.<sup>10</sup>

Pada tanggal 18 Desember 2013 Direktur Asia Timur dan Pasifik Kemenlu menyurati Konsul Jendral Republic Indonesia di Ho Chi Minh City dengan tembusan ke Dirjen Aspasaf, Dubes Republik Indonesia untuk Vietnam dan Walikota Padang, yang mengintruksikan agar Konsul Jendral Republik Indonesia di Ho Chi Minh City memfasilitasi kunjungan delegasi Pemko Padang ke Vung Tau. Pada 20 Desember 2013 Dirjen Aspasaf Direktur Asia Timur dan Pasifik menyurati Walikota Padang menyatakan dukungan Kemenlu atas rencana keberangkatan delegasi Pemko Padang ke Vung Tau untuk pembahasan Draft Mou.<sup>11</sup>

Pada tanggal 24 Januari 2014 Konsul Jenderal RI untuk Ho Chi Minh City menyurati Walikota Padang perihal rencana kunjungan kerja delegasi Pemko Padang menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Ba Ria Vung Tau menyanggupi dan siap

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

menerima delegasi Pemko Padang pada tanggal 10 sampai 14 Februari 2014. Pada tanggal 10 sampai dengan 14 Februari 2014 Delegasi Pemerintah Kota Padang berkunjung ke Vung Tau untuk pembahasan Draft MoU sekaligus pengenalan dengan instansi-instansi terkait. Hasil dari kunjungan ini ialah draft MoU yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Pada tanggal 17 Februari 2014 ucapan terimakasih dari Walikota Padang kepada Wakil Gubernur Ba Ria Vung Tau atas penerimaan Kota Vung Tau. Pada tanggal 2 Juni 2014 ucapan selamat atas terpilihnya Bapak Mahyeldi sebagai Walikota Kota Padang dari Wagub (mewakili gubernur) Ba Ria Vung Tau sekaligus permintaan untuk menuntaskan proses pembentukan kerjasama Sister City Padang Vung Tau.<sup>13</sup>

Pada tanggal 8 Juli 2014 surat dari Konsul Jenrdal Republik Indonesia kepada Walikota Padang untuk tindak lanjut atau penuntasan dari Proses pembentukan kerjasama Sister city Padang dengan Vung Tau. Pada tanggal 3 Oktober 2014 surat balasan Walikota Padang kepada Gubernur Ba Ria Vung tau menyatakan komitmen Pemko Padang untuk menuntaskan proses kerjasam Sister City sampai ke tahap penandatanganan MoU.<sup>14</sup>

Pada tanggal 6 Maret 2015 Walikota Padang menyurati DPRD Kota Padang untuk meminta persetujuan DPRD sebagai salah satu syarat dalam proses pembentukan hubungan kerja sama Sister City antara Kota Padang – Kota Vung Tau. Pada tanggal 5 Agustus 2015 Walikota Padang menyurati Gubernur Provinsi Sumatra Barat untuk memfasilitasi Rapat Interkementrian pembahasan draf MoU sebagai salah satu syarat dalam proses pembentukan hubungan kerja sama Sister City antara Kota Padang – Kota Vung Tau.<sup>15</sup>

Pada tanggal 25 Juli 2015 Surat dari Konsul Jenderal RI HCMC kepada Walikota Padang yang memberitahukan bahwa KIRI HCMC telah menerima Nota Dilpomatik dari Pemerintah Provinsi Ba Ria Vung Tau yang menanyakan komitmen Pemko Padang dalam penuntasan proses pembentukan hubungan Sister City anantara Kota Padang – Kota Vung Tau untuk itu KIRI HCMC meminta Pemko Padang untuk menuntaskan proses kerja sama tersebut. Pada tanggal 29 Juli 2015 Surat dari Kemdagi Kepada Walikota Padang yang meminta Pemerintah Kota Padang untuk segera

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

menuntaskan proses pembentukan hubungan Sister City antara Kota Padang – Kota Vung Tau.<sup>16</sup>

Pada tanggal 31 Juli 2015 surat dari Dirjen Asia Pasifik Afrika Kemenlu RI kepada Walikota Padang yang meminta Pemerintah Kota Padang untuk segera menuntaskan proses pembentukan hubungan Sister City antara Kota Padang – Kota Vung Tau yang diharapkan dapat tuntas dan melaksanakan penandatanganan MoU pada Bulan Desember 2015 berbarengan dengan Momentum perayaan 60 tahun hubungan Diplomatis Indonesia – Vietnam. Pada tanggal 21 September 2015 DPRD Kota Padang Mengundang Pembko untuk Persetujuan kerjasama dan kemitraan Kota Padang dengan Vung Tau (Vietnam).<sup>17</sup>

Pada tanggal 25 September 2015 walikota Padang menyurati kementerian dalam negeri RI cq. Kepala administrasi kerjasama luar negeri untuk memfasilitasi pembahasan draf MoU sebagai salah satu syarat dalam proses pembentukan hubungan kerja sama Sister City antara Kota Padang – Kota Vung Tau. Pada tanggal 29 oktober 2015 DPRD kota padang nomor 28 A mengeluarkan surat keputusan tentang persetujuan kerjasama dan kemitraan kota padang dengan kota Vung Tau ( Vietnam ).<sup>18</sup>

Pada tanggal 2 November 2015 kementerian dalam negeri RI cq. Pusat administrasi kerjasama luar negeri mengundang pemko padang untuk menghadiri rapat interkementerian pembahasan draf MoU di kemdagri tanggal 4 November 2015. Pada tanggal 16 November 2015 walikota padang menyurati MR. Nguyen Van Trinh Ba Ria Vung Tau draft MoU reviewed by the Indonesia central government inter ministerial meeting. Pada tanggal 11 Januari 2016 surat dari konsulat jenderal RI kepada Walikota Padang Meminta kesediaan Pemko Padang untuk menyelesaikan prosedur yang perlu dilakukan dan mengatur waktu serta lokasi penandatanganan MoU.<sup>19</sup>

Pada tanggal 29 Januari 2016 walikota Padang menyurati sekjen kemdagri Cq. Pusat fasilitas kerja sama meminta pusat fasilitasi kerjasama kemdagri untuk memohon full power ke menteri luar negeri An. Pemko padang untuk menandatangani MoU Sister City – Padang Vung Tau. Pada tanggal 14 MArset 2017 walikota padang mengirimkan surat kepada ibu menteri luar negeri RI cq. Dirjen asia pasifik afrika kemnetrian luar

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

negeri RI mengenai penandatanganan MoU Sister City kota padang ( Sumatera Barat, Indonesia ) – Kota Vung Tau ( Provinsi Ba Ria, Vietnam ) telah menyetujui draf MoU yang telah dibahas pada rapat Interkem di Pusat Fasilitas Kerjasama Kemdagri pada tanggal 4 November 2015.<sup>20</sup>

Pada tanggal 12 April 2016 walikota Padang mengirimkan surat kepada Konsul Jenderal RI Ho Chi Minh City di Vietnam terkait, permohonan penandatanganan MoU Sister City Kota Padang – Provinsi Ba Ria Vung Tau di Kemenlu antara tanggal 26 s/d 31 Mei 2016. Pada tanggal 8 Mei 2016 Konsul Jenderal RI di Ho Minh City mengirimkan Faximile Nomor B-/Ho Chi Minh City/160504 kepada Walikota Padang perihal Penyampaian Nota Diplomatik terkait waktu dan tempat penadatangana MoU. Pada tanggal 12 Mei 2016 walikota Padang membalas Faximile dari konsul Jenderal RI Ho Chi Minh City terkait penyampaian nota diplomatic waktu dan tempat penandatanganan MoU antara Pemko Padang Provinsi BRVT untuk dilakukan pada akhir Bulan Mei yakni antara tanggal 26 – 31 Mei 2016.<sup>21</sup>

Pada tanggal 13 Mei 2016 surat kementerian luar negeri RI atas tanggapan rencana penandatanganan MoU Sister City Kota Padang Provinsi Ba Ria Vung Tau untuk memberikan kesempatan kepada BRTV untuk berkunjung ke Kota Padang sekaligus menikmati keindahan serta melihat berbagai potensid daerah maupun peluang kerja sama. Pada tanggal 20 mei 2016 kementerian dalam negeri mengirimkan surat balasan penerbitan full power bagi H. Mahyeldi, SP walikota Padang.<sup>22</sup>

Pada tanggal 23 mei 2016 direncanakan akan mengirimkan koreksi draft MoU yang telah merancang pelaksanaa penandatanganan MoU di Kota Padang pada hari selasa 31 Mei 2015. Pada tanggal 23 Mei 2016 socialist republic of Vietnam Ba Ria Vung Tau mengirimkan surat ke walikota padang tentang MoU yang berkaitan pembangunan kerjasama dan partnership. Pada tanggal 25 Mei 2016 kemenlu RU memberi kuasa penuh kepada walikota padang untuk menandatangani atas nama pemerintah Republik Indonesia momerandum saling pengertian antara pemerintah kota padang provinsi sumatera barat republik Indonesia dan komite rakyat pemerintah

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

provinsi Ba Ria Vung Tau republic Sosialis Vietnam tentang kerjasama kota bersaudara.<sup>23</sup>

Pada tanggal 31 Mei 2016 undangan penandatanganan MoU Sister City antara pemerintah kota Padang dengan pemerintah provinsi Ba Ria Vung Tau Vietnam. Pada tanggal 31 Mei 2016 penandatanganan momerandum saling pengertian antara pemerintah kota Padang dengan komite rakyat pemerintah provinsi Ba Ria Vung Tau tentang pembentukan kerjasama kota bersaudara. Pada tanggal 6 Juni 2016 komite provinsi Ba Ria Vung Tau mengucapkan terimakasih atas terlaksananya MoU di kota Padang tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 2016. Pada tanggal 10 Juni 2016 kemenlu menyampaikan Salinan naskah resmi (Certifikat True Copy) MoU between The People's Committee of the province of Ba Ria – Vung Tau The Socialists Republic of Vietnam and the government of the city of Padang West Sumatera Proviencie the republic of Indonesia concening Sister City Cooperation.<sup>24</sup>

## B. Analisis

Analisis ini berisikan tentang implementasi, faktor pendukung, faktor penghambat, perbandingan *Sister City* antara Kota Padang dengan kota Vung Tau dan Kota Padang dengan Hildesheim, Perbandingan dari Tinjauan Pustaka sebagai berikut :<sup>25</sup>



---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Wawancara Hendri Agung Indrianto, B.Mgt, MHPS, pada tanggal 5 Februari 2017 pukul 12.34 WIB di Kediaman Pribadi.



## 1. Implementasi

Sampai sejauh ini di dalam berjalannya kerjasama *Sister City* kota Padang dengan kota Vung Tau baru sampai tahap MoU dan akan segera dibahas untuk MoA. dari tahapan perencanaan, tahapan *Letter of Intent*, dan tahapan *Memorandum of Understanding* berjalan sesuai dengan rencana dan dapat dikatakan tidak cepat ataupun lambat.<sup>26</sup>

Dalam kerjasama ini, pengimplementasian pada masing-masing bidang yang dikerjasamakan belum berjalan. Namun untuk tahun 2018 dapat diprediksi dengan kemungkinan besar berjalannya kerjasama *Sister City* kota Padang dengan kota Vung Tau berjalan cepat karena pada tahun tersebut program-program yang direncanakan sudah di mulai berjalan sehingga pemerintah pada masing-masing kota terpacu untuk segera mewujudkan tujuan dari kerjasama tersebut.<sup>27</sup>

## 2. Faktor pendukung

Dalam berjalannya kerjasama *Sister City* kota Padang dengan kota Vung Tau dari tahapan perencanaan, tahapan *Letter of Intent*, dan tahapan *Memorandum of Understanding* pemerintah kota Padang melihat adanya faktor pendukung sebagai berikut.<sup>28</sup>

1. Bidang yang dikerjasamakan dalam Kerjasama *Sister City* kota Padang dengan kota Vung Tau sesuai dengan visi dan misi kota Padang yaitu Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius, dan Berbudaya sehingga pemerintah lebih konsen dalam melakukan kerjasama tersebut.
2. Teknologi yang canggih sehingga membantu dalam berkomunikasi dengan lancar.
3. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kota Padang memberikan dukungan sehingga berjalannya kerjasama tersebut sesuai dengan rencana.

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*

### 3. Faktor penghambat

Dalam berjalannya kerjasama *Sister City* kota Padang dengan kota Vung Tau dari tahapan perencanaan, tahapan *Letter of Intent*, dan tahapan *Memorandum of Understanding* pemerintah kota Padang melihat adanya faktor penghambat sebagai berikut.<sup>29</sup>

1. Banyaknya prosedur untuk meminta izin pada birokrasi dalam tahapan perencanaan, tahapan *Letter of Intent*, dan tahapan *Memorandum of Understanding* sesuai dengan aturan Permenlu no.09/A/KP/XII/2006/01 sehingga untuk perizinan saja menelan waktu yang sangat panjang.
2. Dana pemerintah untuk penganggaran program kerjasama *Sister City* kota Padang dan kota Vung Tau. Karena sumber pembiayaan hanya bersumber dari anggaran pendapatan, belanja daerah dan sumber-sumber lain yang sah. Dalam penelitian ini, peneliti tidak mendapatkan data tentang penganggaran program kerjasama *Sister City* kota Padang dan kota Vung Tau.

### 4. Perbandingan *Sister City* antara Kota Padang dengan kota Vung Tau dan Kota Padang dengan Hildesheim

Kerjasama *sister city* antara Kota Padang dan Hildesheim ditandatangani pada tanggal 20 Juni 1988. Dalam Minutes of Meeting dari kedua kota kembar tersebut yang ditandatangani pada 19 Juni 2015 Kerjasama ini melakukan kerjasama di 3 bidang utama, yaitu pertukaran pelajar, pengiriman tenaga magang di berbagai sektor industri di Hildesheim dan revitalisasi bangunan bersejarah.<sup>30</sup>

Kerjasama ini sempat mengalami pasang surut karena sempat terhenti dan terjalin lagi dikarenakan adanya pergantian Walikota sehingga terjadi perubahan keputusan untuk melakukan kerjasama *Sister City* dikarenakan pada waktu itu tidak ada landasan hukum yang mengatur tentang kerjasama *Sister City* sehingga semua keputusan ada ditangan Walikota. Kerjasama *sister city* antara Kota Padang dan Hildesheim juga sempat terhenti Karena adanya bencana alam yang terjadi di Padang pada tahun 2009 yaitu gempa padang.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*

## 5. Perbandingan dari Tinjauan Pustaka

Dari data pembanding penelitian Kerjasama *Sister City* Kota Padang dengan kota Vung Tau, peneliti menggunakan data pembanding penelitian sebagai berikut :

Adapun peneliti yang pertama Irdayanti mahasiswa UIN Sultan Syarif Khasim Riau dengan judul Substansi Kerjasama Luar Negeri *Sister City* Kota Surabaya-Xiamen.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini dijelaskan Kerjasama *Sister City* atau kota kembar banyak dipengaruhi oleh adanya kesamaan secara geografis dan kegiatan kota yang dapat membuat kedua kota lebih maju sehingga terwujudnya kerjasama untuk kondisi ini diperkuat oleh adanya undang-undang mengenai kerjasama yang berkaitan dengan daerah. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi setiap daerah yang akan melaksanakan kerjasama dengan wilayah yang berada di luar negeri. Oleh karena itu, persamaan antara Surabaya dengan Xiamen antara lain adanya pelabuhan dan institut teknologi. Kerjasama ini di bidang perdagangan.

Kerjasama *Sister City* antara Surabaya dan Xiamen mempunyai kesamaan dengan *Sister City* padang dan Vung Tau sebagaimana dilihat dari penjelasan diatas yaitu :

1. Alasannya sama karena segi persamaan karakteristik yaitu persamaan antara Surabaya dengan Xiamen antara lain adanya pelabuhan dan institut teknologi, sedangkan kota Padang dengan Vung Tau juga karena persamaan letak geografis, demografi, kota padang juga mempunyai pelabuhan juga seperti vung tau, dan potensi kota seperti sektor pertanian, perikanan, pariwisata.
2. Bidang yang dikerjasamakan sama yaitu pada bidang perdagangan meskipun programnya berbeda.
3. Kota Padang dan Surabaya menjalin kerjasama dengan kota dinegara lain yang kota tersebut mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama.
4. Sistemastika dalam tahapan perizinan sama dikarenakan di Indonesia sudah ada undang-undang yang mengatur kerjasama antar daerah dengan negara lain.

Kerjasama *Sister City* antara Surabaya dan Xiamen mempunyai perbedaan dengan *Sister City* Padang dan Vung Tau sebagaimana dilihat dari pembanding penelitian diatas yaitu pada program kerjasama *Sister City* antara Surabaya dan Xiamen serta Kerjasama

---

<sup>32</sup> Irdayanti. 2014. Kerjasama Luar Negeri *Sister City* Kota Surabaya-Xiamen. UIN Sultan Syarif Khasim Riau.

*Sister City* Padang dan Vung Tau berbeda. Kemudian kerjasama Padang dengan Vung Tau lebih banyak dilakukan yaitu pada sektor pariwisata, pendidikan, pertanian dan perikanan tetapi kerjasama Surabaya dan Xiamen hanya di sektor perdagangan saja.

Penelitian yang kedua dari Reni Widiani Wulandari dosen FISIP UNDIP Semarang dengan judul Implementasi *Sister Province* Propinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia dibidang Pertanian.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini disebutkan kerjasama *Sister Province* dari Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland di Australia. Kesamaan kondisi geografis maupun bentuk pemerintah bukan sebagai alasan terjadinya kerjasama tersebut, tetapi hanya semata-mata Provinsi Jawa Tengah belum memiliki kerjasama *Sister Province* lain dengan negara manapun. Kerjasama yang dilakukan meliputi bidang Pertanian, Pembangunan kota dan desa, perhubungan dan pariwisata, industri, perdagangan dan investasi, pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang-bidang yang akan disetujui oleh kedua pihak.

Dalam penelitian pembandingan kedua, terdapat kesamaan dengan *Sister City* kota Padang dengan Vung Tau yaitu :

1. Bidang yang dikerjasamakan terdapat kesamaan, jika pada penelitian pembandingan yang kedua bidang yang dikerjasamakan pendidikan, pertanian, pariwisata pada *Sister City* Padang dan Vung Tau juga sama.
2. Mekanismenya dan undang-undang yang mengatur pada kedua *Sister City* juga sama.

Untuk perbedaannya sendiri dalam kedua penelitian ini yaitu :

1. Aktornya berbeda, Di pembandingan kedua menggunakan aktor provinsi sedangkan *Sister City* Padang dan Vung Tau aktornya ialah kota.
2. Alasannya pada pembandingan kedua tidak semata-mata karena persamaan karakteristik tetapi juga karena Jawa Tengah belum mempunyai *Sister Province* dengan negara lain.

Adapun penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maya Faridha mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam Media Jurnal Analisis Hubungan Internasional tentang Kerjasama *Sister City* Surabaya dengan

---

<sup>33</sup> Reni Widiani Wulandari.2014. Implementasi *Sister Province* Propinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia dibidang Pertanian.FISIP UNDIP Semarang

Verna.<sup>34</sup> Dalam penelitian, peneliti mengemukakan faktor yang menjadi latar belakang kerjasama *sister city* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan mitra keenam *sister city* yaitu Pemerintah Kota Varna. Kerjasama *sister city* biasanya didasari oleh adanya sejumlah persamaan masing masing kota. Begitu juga dengan Kota Surabaya dan Kota Varna yang memiliki beberapa kemiripan. Kota Surabaya dan kota Varna sama-sama menjadi kota dengan pelabuhan kedua terbesar di negaranya masing-masing juga merupakan tempat markas Angkatan Laut dan Akademi Militer Angkatan Laut, kemudian sama sama memiliki fakultas kedokteran yang maju.

Pada penelitian perbandingan ketiga terdapat kesamaan dengan *Sister City* Padang dan Vung Tau yaitu melakukan kerjasama dengan alasan kesamaan karakteristik, kemudian untuk mekanisme dalam perizinan setiap tahapan sama sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.

Penelitian keempat adalah penelitian Khoero Dara Fazra Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional (Studi Kasus: Proses Kerja sama Sister City Kabupaten Bogor dengan Nanning (RRT ) pada tahun 2008-2015).<sup>35</sup> Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah daerah kabupaten Bogor bekerjasama dengan Nanning melalui kerjasama *sister city*.

Dalam mekanisme pelaksanaannya, setiap pemerintah daerah harus melalui lima tahap tersebut untuk mengadakan kerjasama *Sister City*. Kelima tahapan tersebut merupakan prosedur resmi yang menjadi proses kewajiban yang harus dilaksanakan. Namun, proses yang sangat memakan waktu sering menjadi masalah bagi pemerintah daerah yang akan melaksanakan kerjasama *Sister City*. Masalah prosedur menjadi hambatan bagi terlaksananya kerjasama tersebut. Hal ini juga menjadi masalah bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Nanning. Masalah birokrasi dan prosedural menjadi masalah bagi terlaksananya kerjasama *Sister City*.

Dalam rangka menjalankan kerjasama *Sister City* tersebut, tahapan-tahapan tersebut juga dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Namun, pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan dalam empat tahapan besar guna memotong masalah prosedural tersebut. Tahap pertama adalah peninjauan atau pengenalan, Tahap yang kedua, yaitu

---

<sup>34</sup> Maya Faridha. 2012. Analisis Hubungan Internasional tentang Kerjasama *Sister City* Surabaya dengan Varna. Media jurnal analisis HI volume 2 no 1.

<sup>35</sup> Khoero Dara Fazra. 2014. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional (Studi Kasus: Proses Kerja sama Sister City Kabupaten Bogor dengan Nanning (RRT ) pada tahun 2008-2015). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

pembahasan draft MoU, Tahap yang ketiga, yaitu penandatanganan MoU, Tahap keempat, pelaksanaan kegiatan.

Dalam pembandingan keempat terdapat perbedaan dengan *Sister City* Padang dan Vung Tau yaitu tahapan pada penelitian pembandingan keempat tidak melalui tahapan LoI tetapi langsung pada MoU. Persamaannya sendiri, Pemerintah Bogor dan Padang mengeluhkan hal yang sama yaitu birokrasi dan prosedural *Sister City* yang memerlukan waktu lama sehingga berdampak memperlama berjalanya kerjasama tersebut.

Penelitian yang kelima dari Rizki Tegar Sembada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul Peluang Dan Tantangan Kerja Sama *Sister City* Kota Bandung Dengan Hamamatsu (2014-2015).<sup>36</sup> Dalam penelitian Kerjasama antara Kota Bandung dengan Kota Hamamatsu, kota Bandung yang tidak terlalu melihat kesamaan kulture atau budaya atau kesamaan lainnya akan tetapi lebih dilihat dari segi peluang dan *benefit* yang akan Kota Bandung dapatkan dari kerjasama dengan Kota Hamamatsu. Kerjasama yang dilakukan Kota Bandung dengan Kota Hamamatsu Jepang yang memiliki peluang besar dalam peningkatan Kerjasama dari LoI ke MoU dilihat dari sejarah kota tersebut serta prospek kerjasama yang telah mereka lakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Kota Bandung memiliki alasan yang mendasar dan mengakar dalam perjalanannya melakukan kerjasama dengan Kota Hamamatsu, alasan ini yang didasari dan diyakini mengapa Kota Bandung ingin melakukan Kerjasama *sister city* dengan Hamamatsu berawal ketika jaman perang pasifik ketika tentara Jepang asal Kota Hamamatsu ditolong oleh warga Bandung, hal kecil namun cukup berpengaruh dalam sejarah kerjasama antara kedua Kota tersebut.

Dari data pembandingan terakhir, terdapat kesamaan Kerjasama *Sister City* kota Padang dengan kota Vung Tau yaitu bidang yang dikerjasamakan, kemudian untuk perbedaanya dimana kota Bandung tidak melihat kesamaan karakteristik kedua kota untuk alasan melakukan *Sister City* dengan kota Hamamatsu melainkan melakukan kerjasama atas dasar hubungan persahabatan.

---

<sup>36</sup> Rizki Tegar Sembada. 2016. Peluang Dan Tantangan Kerja Sama *Sister City* Kota Bandung Dengan Hamamatsu (2014-2015).Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dari semua data perbandingan penelitian di atas dapat dilihat terdapat perbedaan dan persamaan antara kerjasama *Sister City* yang satu dengan yang lain. Persamaannya dengan Kerjasama *Sister City* kota Padang dengan kota Vung Tau sebagai berikut:

1. Kerjasama *Sister City* dilakukan atas dasar kesamaan karakteristik antara dua kota seperti Letak geografis, demografi, keadaan pemerintahan, perekonomian, bidang potensi kota seperti pada sektor pariwisata, budaya, perikanan, pertanian dan lain-lain.
2. Dalam melaksanakan kerjasama *Sister City* kedua kota melakukan kerjasama dengan tujuan yang sama yaitu mengembangkan potensi kota.
3. Semua kerjasama *Sister City* dilakukan sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan sesuai Peraturan Menteri Luar Negeri di no.09/A/KP/XII/2006/01.

Perbedaannya dengan Kerjasama *Sister City* kota Padang dengan kota Vung Tau sebagai berikut :

1. Ada beberapa kerjasama *Sister City* tidak melihat karena persamaan karakteristik seperti pada penelitian Rizki Tegar Sembada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul Peluang Dan Tantangan Kerja Sama *Sister City* Kota Bandung Dengan Hamamatsu (2014-2015). Dimana kota Bandung tidak melihat kesamaan karakteristik kedua kota untuk alasan melakukan *Sister City* dengan kota Hamamatsu.
2. Bidang yang dikerjasamakan dalam setiap kerjasama *Sister City* berbeda-beda karena bidang yang dikerjasamakan sangat banyak diantaranya :
  - a. Kerjasama Ekonomi
    - 1) Perdagangan
    - 2) Investasi
    - 3) Ketenagakerjaan
    - 4) Kelautan dan Perikanan
    - 5) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
    - 6) Kehutanan
    - 7) Pertanian
    - 8) Pertambangan
    - 9) Kependudukan
    - 10) Pariwisata
    - 11) Lingkungan Hidup

## 12) Perhubungan

### b. Kerjasama Sosial Budaya

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Kepemudaan
- 4) Kewanitaan
- 5) Olahraga
- 6) Kesenian

### c. Bentuk Kerjasama lain

3. Aktor dalam kerjasama *Sister City* ada yang berbeda seperti pada penelitian Reni Widiani Wulandari dosen FISIP UNDIP Semarang dengan judul Implementasi *Sister Province* Propinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia dibidang Pertanian. Aktornya dalam penelitian tersebut provinsi dengan provinsi.

Kerjasama *Sister City* kota Padang dengan Kota Vung Tau sendiri dilakukan karena adanya kesamaan karakter dan kesetaraan antar dua kota secara geografis maupun demografis dan kesamaan potensi kota seperti perikanan, pertanian dan pariwisata dan alasan lain karena keinginan kedua kota sama-sama ingin mengembangkan potensi kota seperti ekonomi, Sains dan Teknologi, Perikanan, Pertanian dan Peternakan, Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan.